**BAB I**

# PENDAHULUAN

* 1. **Latar Belakang**

Salah satu tahapan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah adalah aspek perencanaan pembangunan daerah. Berpedoman pada UU Nomor: 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini mengamanatkan untuk menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi RPJP Daerah (20 tahun), RPJM Daerah (5 tahun) dan RKPD (1tahun).

Perangkat Daerah (PD) menyusun Rencana Strategis lima tahunan dengan mengacu pada RPJMD. Sementara Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode tahunan dengan mengacu RKPD yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2019 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Purworejo merupakan penjabaran dari Renstra Program dan Kegiatan yang ada di Renja harus tercantum dalam Renstra yang selanjutnya menjadi dasar/pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2019.

Tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak adalah membantu Bupati dalam Melaksanakan urusan pemerintah Bidang Sosial, Keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan kewenangan daerah yang meliputi Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga.

Penyusunan Rencana Kerja perubahan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dimulai dengan usulan kegiatan yang diajukan oleh masing-masing Kasubag pada Sekretariat, Bidang Asistensi dan Pembinaan Potensi, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Sejahtera, Bidang Keluarga Berencana, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disesuaikan dengan kebutuhan riil yang ada agar kemudian usulan kegiatan tersebut dirangkum menjadi Rancangan Rencana Kerja perubahan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan disepakati kemudian diolah serta diajukan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo untuk pembahasan dan kesepakatan dengan Tim Anggaran Kabupaten Purworejo. Hasil pembahasan

dan kesepakatan dengan Tim Anggaran tersebut untuk selanjutnya menjadi Rencana Kerja perubahan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Purworejo pada Tahun 2018 adalah

1. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran
2. Peningkatan kemandirian desa
3. Penguatan perekonomian daerah yang didukung dengan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis berbasis produk unggulan daerah fan investasi
4. Penguatan ketahanan air, infrastruktur dasar dan interkoneksi antar wilayah guna mendukung investasi dan pengembangan wilayah
5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
6. Peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan nilai – nilai budaya daerah
7. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
8. Tata kelola pemerintahan yang baik dan kondusivitas daerah serta pengelolaan bencana
9. Penguatan inovasi daerah dan teknologi tepat guna

Dalam rangka mewuuujudkan arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2019 program yang akan dilaksanakan oleh DINSOSDUKKBPPPA adalah

1. Program Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
2. Program Penghargaan Kepahlawanan
3. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5. Program Peningkatan Kepesertaan Keluarga Berencana bagi Pasangan Usia Subur Miskin
6. Program Keluarga Sejahtera
7. Program Administrasi Perkantoran
8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
9. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
10. Program Penyusunan Data Dasar
	* 1. **Pengertian Renja Perangkat Daerah**

Renja Perangkat Daerah yang disingkat Renja (PD) sesuai dengan nomor 86 Tahun 2017 yang mengatur tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Renja Perangkat daerah sesuai dengan pasal 11 ayat 3 yang mengatur tentang rencana Perangkat Daerah yang terdiri atas Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 3 yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

* + 1. **Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah**

Dalam menyusun Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat 1 perangkat Daeah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda dan pemangku kepentingan. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra PD dan RKPD.

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 3 disusun dengan tahapan

1. Persiapan penyusunan

2. Penyusunan rancangan awal

3. Penyusunan rancangan

4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/ lintas

5. Perangkat Daerah

6. Perumusan rancangan akhir

7. Penetapan

Sesuai dengan pasal 128 dalam Pemendagri 86/2017 penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 126 mencakup:

1. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah

2. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu

Dengan hasil perumusan rancangan awal Renja PD sebagaimana disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat :

1. Pendahuluan

2. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu

3. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah

4. Rencana kerja dan pendanaan PD

5. Penutup

Rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan surat edaran Kepala Daerah yang mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD. Rumusan kegiatan baru diajukkan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA dalam forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah.

Penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja PD berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah, yang disampaikan paling lambat awal bulan Juni. Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja perubahan Perangkat Daerah, yang disampaikan paling lambat awal bulan Juli. Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja perubahan Perangkat Daerah harus menjamin rancangan Renja perubahan Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan awal RKPD. Apabila terdapat hasil yang perlu disempurnakan Bappeda menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan kepada kepala Perangkat Daerah untuk disempurnakan. Verifikasi rancangan renja setelah penyampaian rancangan Renja PD kepada Bappeda paling lambat 2 minggu setelah penyerahan. Bappeda menyampaikan seluruh akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagiamana dimaksud dalam Pasal 139 kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada, paling lambat 1 bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan. Renja perubahan Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA perubahan Perangkat Daerah.

* + 1. **Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja Perangkat Daerah mengacu pada RKPD, Renstra PD, RPJMD, dan RPJPD. Hubungan antara dokumen tersebut diatas dapat digambarkan dalam bagan berikut:

 Gambar :1.1

RPJPD

DAERAH

PERANGKAT DAERAH

RPJMD

**RKPD**

RENSTRA PD

RENJA PD

* 1. **Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019 adalah:

1. Undang-undang Nomor: 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
2. Undang-undang Nomor: 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tatacara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
5. Pemerintahan Daerah Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan nomor 8 tahun 2008
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor: 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor: 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor: 12 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor: 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo.
10. Peraturan BupatiNomor:19 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016
11. Peraturan Bupati Nomer 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Purworejo.

Adapun tugas dari DINSOSDUKKBPPPA yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah bidang sosial, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantu yang diberikan kepada Daerah yang meliputi bidang asistensi dan pembinaan potensi kesejahteraan dan nilai – nilai sosial, rehabilitasi sosial, pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dalam melaksanakan tugas DINSOSDUKKBPPPA menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang meliputi aistensi dan pembinaan potensi kesejahteraan dan nilai – nilai sosial, rehabilitasi

sosial, pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

1. Pelaksanaan kebijakan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang meliputi aistensi dan pembinaan potensi kesejahteraan dan nilai – nilai sosial, rehabilitasi sosial, pengendalian penduduk, dan keluarga sejahtera, keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
2. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang meliputi sistensi dan pembinaan penduduk dan keluarga sejahtera, keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
3. Pelaksanaan administrasi dinas bidang sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang meliputi asisteni dan pembinaan potensi kesejahteraan dan nilai – nilai sosial, rehabilitasi sosial, pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
4. Membina UPT dalam pelaksanaan kegiatan teknis opersional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu
5. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas – tugas bidang sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera, Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang melip[uti asistensi dan membina potensi kesejahteraan dan nilai – nilai sosial, rehabilitasi sosial serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
6. Penyelenggaraan kesejahteraan DINSOSDUKKBPPPA
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh BUPATI sesuai dengan tugas dan fungsi
	* 1. **Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Perangkat Daerah**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, telah dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah, merupakan Sekretariat Daerah Tipe A

2. Sekretariat DPRD, merupakan Sekretariat DPRD Tipe A

3. Inspektorat, merupakan Inspektorat Tipe A

4. Dinas daerah terdiri dari:

a. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, merupakan Dinas Daerah Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga

b. Dinas Kesehatan, merupakan Dinas Daerah Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan

c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, merupakan Dinas Daerah Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang

d. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, merupakan Dinas Daerah Tipe C, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan

e. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan Dinas Daerah Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

 f. Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan, merupakan Dinas Daerah Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan, serta bidang kelautan dan perikanan

g. Dinas Lingkungan Hidup, merupakan Dinas Daerah Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan

 h. Dinas Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan Dinas Daerah Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana

 i. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, merupakan Dinas Daerah Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa

 j. Dinas Perhubungan, merupakan Dinas Daerah Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan

 k. Dinas Komunikasi dan Informatika, merupakan Dinas Daerah Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian

 l. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, merupakan Dinas Daerah Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan

 m. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, merupakan Dinas Daerah Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan; 5

n. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan, merupakan Dinas Daerah Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dan bidang perdagangan;

o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Dinas Daerah Tipe C, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, bidang energi dan sumber daya mineral dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;

p. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja merupakan Dinas Daerah Tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi

q. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan Dinas Daerah Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum, sub urusan perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran;

5. Badan Daerah terdiri dari:

a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, merupakan Badan Daerah Tipe B, yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;

b. Badan Kepegawaian Daerah, merupakan Badan Daerah Tipe B, yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian dan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan

c. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah, merupakan Badan Daerah Tipe A, yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan.

* + 1. **Ketentuan tentang Perencanaan dan Pengganggaran**

Peraturan yang mempunyai perencanaan adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembnagunan Jangka Menengah Daerah dan rencana Kerja Pemerintah Daerah.
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700
5. Peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025
7. Peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025
9. Peraturan Daerah kabupaten Nomor 3 Tahun 2012 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

Peraturan yang memayungi penganggaran adalah:

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keungan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

**1.2.3 Ketentuan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perangkat Daerah**

Peraturan mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

 1. Peraturan Pemerintah No.2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

2. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota

Sedangkan untuk indikator yang terkaitan dengan SPM yang ada di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purworejo belum ditindak lanjuti dari organisasi. Indikator terahir yang diadakan DINSOSDUKKBPPPA yang terahir tahun 2016, sedangkan untuk tahun selebihnya dalam penyesuaian.

* 1. **Maksud dan Tujuan**

Renja Perubahan 2019 mengimplementasikan visi dan misi Bupati, renja merupakan rencana kerja perubahan untuk 6 bulan kedepan pada tahun 2019 yang akan dilakukan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Maksud dan tujuan yang ada ada di DINSOSDUKKBPPPA adalah sebagai berikut:

* + 1. **Maksud Penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah**

Renja Perubahan Perangkat Daerah merupakan salah satu dokumen perencanaan Perangkat Daerah ditahun berjalan. Maksud di susunnya renja perubahan yaitu untuk :

1. Memberikan arah berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
2. Menyediakan acuan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
	* 1. **Tujuan Penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah**

Tujuan yang akan dicapai dengan disusunnya Renja Perubahan adalah:

1. Mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah tahun 2018 dalam rangka mewujudkan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati.
2. Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan prioritas program/kegiatan tahunan
3. Menjamin kesinambungan perencanaan dan prioritas program
	1. **Sistematika Penulisan**

Sistematika penyajian Dokumen Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah adalah:

BAB.I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB.II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

* 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB.III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.5. Program dan Kegiatan

BAB.IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB. V. PENUTUP

LAMPIRAN

**BAB II**

**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

**2.1.1. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah 2016-2021 dengan Renja Perangkat Daerah 2016-2017**

Visi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purworejo periode Tahun 2016-2021, yaitu:

**“Terwujudnya Kabupaten Purworejo yang Semakin Sejahtera Berbasis Pertanian, Pariwisata, Industri dan Perdagangan yang Berwawasan Budaya, Lingkungan, dan Ekonomi Kerakyatan”**

Untuk mencapai visi sebagaimana tersebut diatas telah dirumuskan sejumlah misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai kabupaten yang religious dan demokratis.
2. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai gerbang ekonomi utama bagian selatan Provinsi Jawa Tengah yang berbasis pertanian, pariwisata, industri, dan perdagangan.
3. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai Daerah tujuan Wisata unggulan berbasis budaya dan kearifan lokal.
4. Mewujudkan Kabupaten Purworejo yang unggul di bidang seni, budaya olahraga.
5. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai kabupaten yang unggul dibidang pendidikan dan pelayanan kesehatan.
6. Mewujudkan Kabupaten Purworejo menjadi kabupaten yang memiliki aparatur pemerintahan yang mampu melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan partisipatif yang berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik.
7. Mewujudkan desa di Kabupaten Purworejo sebagai pusat pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat dalam berbagai bidang

**Tabel 2.1**

**Tabel Renstra Perangkat Daerah Indikator Kinerja dan Fungsi DINSOSDUKKBPPA yang mengacu pada RPJMD 2016-2021**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Indikator | Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD | Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1 | Cakupan penangananPenyandang MasalahKesejahteraan Sosial | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | * Indeks Pembangunan Gender (IPG)
 | 92, 81 % | 92,90% | 93.00% | 93,01% | 93,20 % | 93,30 % | 93,40 % | 93,40 % |
| * Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
 | 68, 76 % | 68,80 % | 68,85 % | 68,90 % | 68,95 % | 69,00 % | 69.05 % | 69.05 % |
| * Cakupan layanan pemenuhan hak anak
 | 67,2 | 70 | 72 | 75 | 78 | 80 | 85 | 85 |
| 3 | Cakupan dukungan terhadap kinerjaperangkat daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4 | Program Keluarga Berencana ( KB )Rata rata jumlah anak per keluarga | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1,3 | 1,3 | 1.3 | 1,3 | 1,3 |
|  | Jumlah kelompok KB Pria | 48 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 53 |
|  | Rasio akseptor KB | 9,6 | 9,8 | 10 | 10,2 | 10,4 | 10.6 | 10,8 | 10,8 |
|  | Cakupan peserta KB aktif | 82,40 % | 82,45 % | 82,86 % | 82,87 % | 82,95% | 83,00 % | 83,05 % | 83,05 % |
|  | Prosentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmetneed) | 8,00 % | 8,00 % | 7,75 % | 7,50 % | 7,25 % | 7,00 % | 7,00 % | 7,00 % |
|  | Prosentase remaja yang diberikan penyuluhan KRR | 3,45 % | 3,45 % | 5,21 % | 6,91 % | 8,61 % | 10,50 % | 11 % | 11 % |
|  | Prosentase jumlah peserta KB mandiri | 41,15 % | 41,15 % | 41,85 % | 42,42 % | 42,97 % | 43,52 % | 44,05 % | 44,05 % |
|  | Rogram , Peningkatan kepesertaan keluarga berencana bagi pasangan usia subur miskin.Jumlah pasangan usia subur miskin yang terlayani KB | 0 | 0 | 557 akseptor | 1114 akseptor | 1.671 akseptor | 2.228 akseptor | 2.789 akseptor | 2.789 akseptor |

Renstra DINSOSDUKKBPPPA tahun 2016-2021 yang sesuai dengan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD memiliki indicator sebagai berikut:

 1. Cakupan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

 2. - Indeks Pembangunan Gender (IPG)

 - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

 - Cakupan layanan pemenuhan hak anak

 3. Cakupan dukungan terhadap kinerja perangkat daerah

 4. Program Keluarga Berencana(KB) Rata-rata jumlah anak per keluarga

 - Jumlah kelompok KB pria

 - Rasio akseptor KB

 - Cakupan peserta KB aktif

 - Prosentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmetneed)

 - Prosentase remaja yang diberikan penyuluhan KRR

 - Prosentase jumlah peserta KB mandiri

- Program, Peningkatan kepesertaan keluarga berencana bagi pasangan usia subur miskin. Jumlah pasangan usia subur miskin yang terlayani KB

 **Tabel 2.2**

 **Tabel Renja Perangkat Daerah Indikator Kinerja dan Fungsi DINSOSDUKKBPPA yang mengacu pada RPJMD 2016-2021**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Indikator | Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD | Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1 | Cakupan penangananPenyandang MasalahKesejahteraan Sosial | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | * Indeks Pembangunan Gender (IPG)
 | 92, 81 % | 92,90% | 93.00% | 93,01% | 93,20 % | 93,30 % | 93,40 % | 93,40 % |
| * Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
 | 68, 76 % | 68,80 % | 68,85 % | 68,90 % | 68,95 % | 69,00 % | 69.05 % | 69.05 % |
| * Cakupan layanan pemenuhan hak anak
 | 67,2 | 70 | 72 | 75 | 78 | 80 | 85 | 85 |
| 3 | Cakupan dukungan terhadap kinerjaperangkat daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4 | Program Keluarga Berencana ( KB )Rata rata jumlah anak per keluarga | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1,3 | 1,3 | 1.3 | 1,3 | 1,3 |
|  | Jumlah kelompok KB Pria | 48 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 53 |
|  | Rasio akseptor KB | 9,6 | 9,8 | 10 | 10,2 | 10,4 | 10.6 | 10,8 | 10,8 |
|  | Cakupan peserta KB aktif | 82,40 % | 82,45 % | 82,86 % | 82,87 % | 82,95% | 83,00 % | 83,05 % | 83,05 % |
|  | Prosentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmetneed) | 8,00 % | 8,00 % | 7,75 % | 7,50 % | 7,25 % | 7,00 % | 7,00 % | 7,00 % |
|  | Prosentase remaja yang diberikan penyuluhan KRR | 3,45 % | 3,45 % | 5,21 % | 6,91 % | 8,61 % | 10,50 % | 11 % | 11 % |
|  | Prosentase jumlah peserta KB mandiri | 41,15 % | 41,15 % | 41,85 % | 42,42 % | 42,97 % | 43,52 % | 44,05 % | 44,05 % |
|  | Rogram , Peningkatan kepesertaan keluarga berencana bagi pasangan usia subur miskin.Jumlah pasangan usia subur miskin yang terlayani KB | 0 | 0 | 557 akseptor | 1114 akseptor | 1.671 akseptor | 2.228 akseptor | 2.789 akseptor | 2.789 akseptor |

**2.1.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Renja Perangkat Daerah disusun setelah ditetapkannya RKPD, Proses Dokumen Renja menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran masih melalui beberapa tahapan. Renja Perangkat Daerah disusun berdasar kebutuhan dengan menggunakan Analisis Standar Biaya (ASB), untuk menentukan besaran anggaran maksimal, selanjutnya renja akan disusun oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan persetujuan DPRD menetapkan KUA-PPAS. Oleh karena itu seringkali antara kebutuhan dan kemampuan keuangan tidak sebanding, dan mengakibatkan Renja yang telah disusun mengalami penyesuaian dengan KUA-PPAS tersebut.

##  2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah seperti tertuang dalam Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD 2017 disajikan seperti pada tabel lampiran I.

**2.2.1 Analisis Kondisi dan rencana tata ruang wilayah**

Telaah RTRW tidak secara langsung bersinggungan dalam pelayanan tugas dan fungsi dinas. Pada urusan Sosialduk KB dan PPPA, penyelenggaraan pelayanan pada masyarakat tidak membutuhkan telaah RTRW. Oleh karena tugas dan fungsi –nya bukan pembangunan fisik, bisa jadi telaah dan kajian tersebut ditangani oleh stake holder (pemangku kepentingan) teknis diluar dinas sosial pengendalian penduduk keluaraga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pemetaan permasalahan sosial, pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih sulit untuk disajikan. Ketiga permasalahan tersebut relatif tersebar di seluruh wilayah tanpa melihat kota dan desa, tanpa membedakan wilayah dataran tinggi atau rendah, tanpa melihat status pendidikan, agama, status sosial, dan sebagainya.

Kekerasan terhadap perempuan, perlindungan anak, pekerja migran, anak yang berhadapan dengan hukum, penyandang disabilitas, pengangguran, perselisihan industrial dan pelayanan kontrasepsi bagi pasangan usia subur/PUS merupakan contoh-contoh permasalahan yang tidak langsung membutuhkan telaah tata ruang wilayah.

2.2.2a Hal- hal positif yang sudah berhasil ditingkatkan oleh Perangkat Daerah

 1. Data PMKS semakin lengkap

 2. Masyarakat semakin mengetahui fungsi gender

 3. Berkurangnya kekerasan terhadap perempuan dan anak

 4. Masyarakat menyadari dan ikut berpartisipasi dalam kepesertaan KB

2.2.2b Masalah dan tantangan yang dihadapai terkait pelayanan oleh Perangkat Daerah

 1. Sosial

 a. Masih adanya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial / PMKS

 b. Masih tingginya angka kemiskinan

 2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

 a. Masih adanya ketidaksertaan dan ketidakadilan gender

 b. Masih adanya kekerasan pada perempuan dan anak

 3. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

 a. Banyaknya keluarga yang belum sejahtera

2.2.2c Kondisi/ prediksi pelayanan Perangkat daerah yang diharapakan ke depan

 1. Penanganan PMKS semakin optimal

 2. Penanganan PMKS mudah dalam akses dan berpartisipasi dalam Kelompok

 Usaha Bersama (KUBE)

1. Optimalnya pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan sosial dalam penanganan PMKS
2. Kesetaraan dan keadilan gender di kalangan masyarakat
3. Tidak adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak
4. Optimalnya pemenuhan hak anak
5. Terbentuknya informasi data gender dengan lengkap

## 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu strategis adalah suatu kondisi yang harus diperhatikan atau diutamakan dalam suatu perencanaan karena berdampak yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa mendatang. Apabila isu strategis tidak diantisipasi diperkirakan akan menimbulkan permasalahan atau kerugian yang lebih besar. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis apabila tidak dimanfaatkan (diantisipasi) akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berbagai informasi isu strategis dapat berasal dari internal Perangkat Daerah maupun Eksternal Perangkat Daerah. Tidak semua informasi tentang isu strategis dapat diangkat menjadi isu strategis dalam penyusunan perencanaan pembangunan.

Dengan telah diketahuinya metode identifikasi sebagaimana tersebut diatas, maka langkah berikutnya mengumpulkan dan mengelompokkan berdasarkan urusan. Berikut adalah isu trategis berdasarkan urusan.

1. Isu strategis urusan sosial
2. Belum optimalnya penanganan PMKS
3. Masih kurangnya PMKS yang memiliki akses dan ikut berpartisipasi dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya
4. Tingginya masyarakat yang memiliki RTLH
5. Belum optimalnya pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan sosial dalam penanganan PMKS
6. Isu strategis urusan PPPA
7. Masih adanya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender di masyarakat
8. Masih adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak
9. Tingkat capaian Pemenuhan Hak Anak belum optimal
10. Penguatan jaringan kelembagaan lembaga layanan korban kekerasan masih perlu ditingkatkan
11. Kapasitas Pengurus Organisasi Perempuan dan Anak masih perlu ditingkatkan
12. Belum terbentuknya sistem informasi data gender yang lengkap
13. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam melaksanakan perencanaandan pengganggaran pembangunan yang responsive gender

## 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Renja merupakan rencana kerja berpedoman pada RKPD yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi dinas dengan memprioritaskan skala kebutuhan. Penyusunan program dan kegiatan telah melalui beberapa mekanisme intern perangkat daerahdengan pagu indikatif.Sehingga, meskipun program dan kegiatan telah disusun berdasarkan kebutuhan, bisa jadi dengan keterbatasan anggaran atau kebijakan pemerintah menjadikan program dan kegiatan tidak dapat dialokasikan pada tahun perencanaan.

Keterbatasan kemampuan keuangan daerah sangat berpengaruh terhadap realisasi program dan kegiatan yang direncanakan.Pada perkembangan dan dinamika permasalahan yang ada ditengah masyarakat menghendaki ada penanggulangan atau penyelesaian yang sifatnya mendesak.Pada sisi lain, program dan kegiatan tidak direncanakan pada tahun dimaksud, hal ini mengakibatkan munculnya program dan kegiatan baru yang harus diakomodir pada perubahan anggaran.

Berbagai permasalahan Sosial, Perngendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki karakteristik masalah yang dinamis, sehingga perlu antisipasi lebih jeli dalam menyusun Renja tahun mendatang.Berdasarkan tahun-tahunsebelumnya dalam menyusun anggaran perangkat daerah, timbul kegiatan yang bersifat mendesak dan segera mendapat penanganan. Terhadap hal demikian perlu langkah-langkah antisipasi bagi para stakeholder.

**2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Usulan Program kegiatan yang diusulkan oleh DINSOSODUKKBPPPA dalam hal ini dilakukan melalui musrenbang DINSOSDUKKBPPPA. Setelah diadakannya musrenbang dengan masyarakat ada usulan dari masyarakat dan akan ditindak lanjuti DINSOSDUKKBPPPA. Adapun usulan kegiatan tersebut dapat dilihat pada bagian lampiran tabel 2.5 dibawah ini :

**Tabel 2.5**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | Unsur OPD / Masyarakat | Masukan/ Saran  | Keterangan |
| 1 | PKK Kab.Purworejo | * Pelaksanaan yang diadakan lomba pada kegiatan KIE KKB, PKK agar diikut sertakan
 |  |
|  |  | * Program pembinaan fasilitasi DWP dan GOW termasuk kegiatan KB, PKK dilibatkan
 |  |
| 2 | Perkumpulan Disabilitas Kab.Purworejo (PDTP) | * Masalah bantuan stimulan (Bansos) yang belum punya BDT agar dimasukkan BDT karena penyandang disabilitas banyak yang belum tahu bagaimana cara masuk ke data BDT.
* Usulan anggran tahun 2020 agar organisasi disabilitas yang ada di Purworejo untuk dimasukkan di dalam anggaran
 |  |
| 3 | FOLKARE (Forum Anak Kab.Purworejo) | * Fasilitas untuk kegiatan folkare agar dipenuhi
* Kegiatan/ acara yang ada hubungannya dengan anak agar dilibatkan
* Diusulkan tentang perda untuk kawasan tanpa rokok
* Untuk hadiah lomba agar diberikan uang pembinaan bukan hanya tropi/ piagam
 |  |

**BAB III**

# TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

## 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan nasional yang terkait dengan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat dari Renstra Kementerian masing-masing kementerian.

Kementerian sosial menetapkan arah kebijakan tahun 2015-2019 adalah sbb :

* 1. Meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, aman dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana dan multilitas yang memadai
	2. Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM penanggulangan bencana di pusat dan daerah;
	3. Menyediakan sarana dan prasarana mitigasi, kesiapsiagaan, sistem peringatan dini dalam menghadapi bencana;
	4. Melakukan edukasi dan penguatan kapasitas masyarakat tentang pengurangan risiko bencana;
	5. Meningkatkan partisipasi dan peran serta multipihak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
	6. Memperkuat koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan antar pemerintah daerah;
	7. Mengoptimalkan kebijakan dan regulasipenanggulangan bencana di pusat dan daerah
	8. Mewujudkan kelembagaan pemerintah efektif, efisien, dan sinergis
	9. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan,kompetitif, dan berbasis merit
	10. Peningkatan kualitas pelayanan publik
	11. Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang efisien, efektif, transparan, dan terintegrasi
	12. Penguatan manajemen kinerja pembangunan
	13. Melaksanakan sistem peradilan anak
	14. Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan
	15. Mengintensifkan upaya sosialisasi bahaya narkoba (demand side)
	16. Meningkatkan upaya terapi dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba (demand side)
	17. Perlindungan Sosial yang komprehensif
	18. Meningkatkan pemenuhan pelayanan dasar bagi penduduk miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT)
	19. Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Pengembangan Ekonomi Lokal bagi, Masyarakat Miskin dan Rentan
	20. Peningkatan Kapasitas dan Keterampilan Masyarakat Miskin dan rentan
	21. Mengurangi kemiskinan dan kerentanan ekonomi di perdesaan dengan upaya
	22. Meningkatkan ketersediaan pelayanan umum dan pelayanan dasar minimum di perdesaan
	23. Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2015-2019 adalah :

1. Mewujudkan perempuan dan anak imdonesia yang berkualitas mandiri dan berkepribadian melalui Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak serta pemenuhan hak anak.
2. Melaksanakan program / kegiatan unggulan berupa :
* Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak
* Akhiri perdagangan manusia
* Akhiri kesenjangan ekonomi

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan KKB adalah sebagai berikut :

1. Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas
2. Penyediaan sarana dan prasarana serta jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi yang memadai di setiap fasilitas kesehatan KB dan jejaring pelayanan, serta pendayagunaan fasilitas kesehatan untuk pelayanan KB
3. Peningkatan pelayanan KB dengan penggunaan MKJP untuk mengurangi resiko
4. drop-out maupun penggunaan non-MKJP dengan memberikan informasi secara berkesinambungan untuk keberlangsungan kesertaan ber-KB serta pemberian pelayanan KB lanjutan dengan mempertimbangkan prinsip Rasional, Efektif, dan Efisien (REE)
5. Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB dan tenaga kesehatan pelayanan KB, serta penguatan lembaga di tingkat masyarakat untuk mendukung penggerakan dan penyuluhan KB
6. Advokasi program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga kepada para pembuat kebijakan, serta promosi dan penggerakan kepada masyarakat dalam penggunaan alat dan obat kontrasepsi KB
7. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja melalui pendidikan, sosialisasi mengenai pentingnya Wajib Belajar 12 tahun dalam rangka pendewasaan usia perkawinan, dan peningkatan intensitas layanan KB bagi pasangan usia muda guna mencegah kelahiran di usia remaja
8. Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiatan bina keluarga dalam rangka melestarikan kesertaan ber-KB dan memberikan pengaruh kepada keluarga calon akseptor untuk ber-KB
9. Penguatan tata kelola pembangunan kependudukan dan KB melalui penguatan landasan hukum, kelembagaan, serta data dan informasi kependudukan dan KB
10. Penguatan Bidang KKB melalui penyediaan informasi dari hasil penelitian/kajian kependudukan, keluarga berencana dan ketahanan keluarga serta peningkatan kerjasama penelitian dengan universitas terkaitpengembangan Program KKBPK

## 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

**3.2.1. Tujuan Renja Perangkat Daerah**

Memperhatikan visi dan misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dan sesuai dengan RPJMD tujuan Renja Perangkat Daerah Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat disusun sebagai berikut :

1. Meningkatkan keberdayaan para penyandang masalah kesejahteraan sosial
2. Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak
3. Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan mewujudkan kesadaran dan keadilan gender.
4. Meningkatnya cakupan akseptor KB
5. Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera yang ber KB

**3.2.2 Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Sasaran Renja Perangkat Daerah selaras dengan Sasaran Startegis Pembangunan Kabupaten yang sesuai dengan RPJMD 2016-2021.

1. Meningkatnya kualitas hidup penyandang masalah ketenagakerjaan dan menurunnya angka kemiskinan
2. Menurunnya angka kemiskinan dan persebaran penduduk
3. Peningkatan IPG, IDG dan capaian pemenuhan hak anak
4. Meningkatnya cakupan akseptor KB
5. Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera yang ber KB

**3.3. Program dan Kegiatan**

Penyusunan Renja Perangkat Daerah melakukan program dan kegiatan yang sesuai dengan rencana aksi DINSOSDUKKBPPPA tahun 2018. Penyusunan program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah mengacu pada program kegiatan yang telah dirumuskan di RKPD 2019.

**3.3.1. Faktor – faktor yang Menjadi Pertimbangan dalam Penetapan Program dan Kegiatan dalam penyusunan Renja Perubahan**

Dalam mendukung terwujudnya visi misi kepala daerah yang dituangkan melalui tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan perlu didukung dengan program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang terukur dan terarah mencakup indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Program yang ada dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu program Administrasi Perkantoran dan program urusan. Program pada non urusan adalah program kesekretariatan yang berfugsi untuk mencapai tujuan dinas yang telah sinergikan dengan tujuan daerah.

Program yang akan dilaksanakan di tahun 2019 dalam perubahan anggaran sebanyak 10 program dengan jumlah kegiatan sebanyak 70 kegiatan dan rencana pelaksanaannya tersebar di seluruh wilayah kabupaten Purworejo. Program dan kegiatan tersebut dapat kami klasifikasikan menurut Urusan dan Non Urusan adalah sebagai berikut:

 Non Urusan

 Jumlah program : 4 program

 Jumlah kegiatan : 24 kegiatan

 Urusan Sosial

 Jumlah program : 2 program

 Jumlah kegiatan : 22 kegiatan

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

 Jumlah program : 1 program

 Jumlah kegiatan : 8 kegiatan

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

 Jumlah program : 3 kegiatan

 Jumlah kegiatan : 16 kegiatan

Rincian program, kegiatan, indicator dan rencana kebutuhan dana dapat dilihat pada table lampiran.

**BAB IV**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH** |  |  |  |
| **NO.** | **URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN** | **INDIKATOR KINERJA** | **PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) TAHUN ANGGARAN 2019** | **Keterangan** | **Keterangan** | **PDPA** | **BERTAMBAH** | **BERKURANG** |  |  |  |
| **TARGET CAPAIAN KINERJA** | **SUMBER DANA** |  **PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)**  |  |  |  |
| **SEMULA** | **MENJADI** | **SEMULA** | **MENJADI** | **SEMULA** | **MENJADI** | **SEMULA** | **MENJADI** | **BERTAMBAH / (BERKURANG)** | **DPA 2019** | **DPA 2019** |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **18** | **18** | **xxx** |  |  |  |  |  |
|  | **Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar Sosial** |   |   |   |   |   |   |  **3.056.396.900**  |  **3.050.098.300**  |  **(6.298.600)** | **3.056.396.900** | **3.056.396.900** | **3.056.396.900** |  |  |  |  |  |
| **I** | **Program Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial** | **Persentase PMKS yang mendapatkan penanganan** | **Persentase PMKS yang mendapatkan penanganan** | **20,37%** | **20,37%** |   |   |  **2.979.108.500**  |  **2.972.809.500**  |  **(6.299.000)** | **2.979.108.500** | **2.979.108.500** | **2.979.108.500** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Cakupan (Potensi Sumber Kessejahteraan Sosial) PSKS yang dibina** | **Cakupan (Potensi Sumber Kessejahteraan Sosial) PSKS yang dibina** | **13,82%** | **13,82%** |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Fasilitasi dan Penanganan Penyandang Disabilitas | Alat bantu disabiltas dan modal usaha, fasilitasi jaminan hidup bagi difabel berat, fasilitasi KUBE disabilitas, bimbingan ketrampilan | Alat bantu disabiltas dan modal usaha, fasilitasi jaminan hidup bagi difabel berat, fasilitasi KUBE disabilitas, bimbingan ketrampilan, BPJS Kesehatan | 17 orang, 112 orang, 2 KUBE, 30 orang | 17 orang, 112 orang, 2 KUBE, 30 orang | APBD KAB. | DAU |  238.749.000  |  238.749.000  |  -  |  238.749.000  |  238.749.000  |  238.749.000  |  -  |  -  |  |  |  |
| 2 | Fasilitasi Rekomendasi Pengadopsian Anak | Fasilitasi rekomendasi dan sosialisasi adopsi anak | Fasilitasi rekomendasi dan sosialisasi adopsi anak | 10 anak, 30 orang tua | 10 anak, 30 orang tua | APBD KAB | DAU |  15.000.000  |  15.000.000  |  -  | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |  -  |  -  |  |  |  |
| 3 | Fasilitasi Komda Lansia | Terfasilitasinya kegiatan komda lansia | Terfasilitasinya kegiatan komda lansia | 16 Kecamatan | 16 Kecamatan | APBD KAB | DAU |  30.000.000  |  30.000.000  |  -  | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |  -  |  -  |  |  |  |
| 4 | Pendampingan dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) / Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) | Parenting di LKS/LKSA /sekolah | Parenting di LKS/LKSA /sekolah | 5 LKSA dan 2 LKS, 48 sekolah | 5 LKSA dan 2 LKS, 48 sekolah | APBD KAB | DAU |  63.160.000  |  63.160.000  |  -  | 63.160.000 | 63.160.000 | 63.160.000 |  -  |  -  |  |  |  |
| 5 | Penyediaan Rumah Singgah untuk PMKS | Operasional Rumah Singgah | Operasional Rumah Singgah, BPJS | 36 orng, 12 bulan | 36 orng, 12 bulan, 2 org | APBD KAB | DAU |  65.000.000  |  65.000.000  |  -  | 65.000.000 | 65.000.000 | 65.000.000 |  -  |  -  |  |  |  |
| 6 | Penanganan Lanjut Usia | Penyuluhan lanjut usia, Bantuan Sembako LU non Potensial dan bantuan modal stimulan untuk usaha (bansos) | Penyuluhan lanjut usia, Bantuan Sembako LU non Potensial dan bantuan modal stimulan untuk usaha (bansos) |  60 orang lansia, 15 orang lansia (non potensial), 4 orang lansia potensial |  60 orang lansia, 15 orang lansia (non potensial), 4 orang lansia potensial | APBD KAB | DAU |  133.010.200  |  133.010.200  |  -  | 133.010.200 | 133.010.200 | 133.010.200 |  -  |  -  |  |  |  |
| 7 | Fasilitasi dan Penanganan Bekas Warga Lembaga Pemasyarakatan (BWLP), Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) miskin dan Tuna Susila | Pembinaan Eks BWLP, Korban KDRT dan Tuna Sosial, Pemberian Alat Kerja, bantuan modal stimulan untuk usaha (Bansos) | Pembinaan Eks BWLP, Korban KDRT dan Tuna Sosial, Pemberian Alat Kerja, bantuan modal stimulan untuk usaha (Bansos) | 30 orang | 30 orang | APBD KAB | DAU |  93.580.000  |  93.580.000  |  -  | 93.580.000 | 93.580.000 | 93.580.000 |  -  |  -  |  |  |  |
| 8 | Fasilitasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan | Terfasilitasinya program keluarga Harapan (pendampingan kegiatan PKH dari Kemensos) | Terfasilitasinya program keluarga Harapan (pendampingan kegiatan PKH dari Kemensos) | 36.000 kpm (keluarga penerima manfaat), 125 org Pendamping, operator, supervisor), 16 kelompok (Pelatihan) | 36.000 kpm (keluarga penerima manfaat), 125 org Pendamping, operator, supervisor), 16 kelompok (Pelatihan) | APBD KAB | DAU |  476.228.000  |  476.228.000  |  -  |  476.228.000  |  476.228.000  |  476.228.000  |  -  |  -  |  |  |  |
| 9 | Pengadaan perlengkapan sekretariat Program Keluarga Harapan dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan | Sarana Prasarana PKH dan TKSK (Komputer, UPS, Printer). | Sarana Prasarana PKH dan TKSK (Komputer, UPS, Printer). | 17 komputer pc, 17 UPS, 17 printer. (untuk sekretariat PKH di kec.) | 17 komputer pc, 17 UPS, 17 printer. (untuk sekretariat PKH di kec.) | APBD KAB | DAU |  294.140.000  |  294.140.000  |  -  |  294.140.000  |  294.140.000  |  294.140.000  |  -  |  -  |  |  |  |
| 10 | Fasilitasi Penanganan Korban Bencana | Pengambilan dan distribusi logistik sampai ke sasaran, Pembinaan Tagana, TOT Layanan Dukungan Psikososial, penjajagan daerah rawan konflik sosial, fasilitasi kampung siaga bencana, operasional dapur umum | Pengambilan dan distribusi logistik sampai ke sasaran, Pembinaan Tagana, TOT Layanan Dukungan Psikososial, penjajagan daerah rawan konflik sosial, fasilitasi kampung siaga bencana, operasional dapur umum, Fasilitasi kegiatan keserasian sosial | 16 kec, 45 org tagana, 20 org TOT, 6 desa, 2 desa kampung siaga, 1 unit | 16 kec, 45 org tagana, 20 org TOT, 4 desa, 2 desa kampung siaga, 1 unit, 1 desa | APBD KAB | DAU |  138.034.000  |  138.034.000  |  -  | 138.034.000 | 138.034.000 | 138.034.000 |  -  |  -  |  |  |  |
| 11 | Penanganan pengemis, gelandangan, orang terlantar dan anak terlantar luar panti | Terlayaninya pengemis gelandangan, orang terlantar terlantar di perjalanan dan terlaksanananya pengiriman anak anak terlantar/psikotik ke panti/baresos/RSU  | Terlayaninya pengemis gelandangan, orang terlantar terlantar di perjalanan dan terlaksanananya pengiriman anak anak terlantar/psikotik ke panti/baresos/RSU  | 4 kali (razia PGOT), 175 org (org terlantar di perjalanan), 20 org (pengiriman anak telantar). | 4 kali (razia PGOT), 175 org (org terlantar di perjalanan), 20 org (pengiriman anak telantar). | APBD KAB | DAU |  80.000.000  |  80.000.000  |  -  | 80.000.000 | 80.000.000 | 80.000.000 |  -  |  -  |  |  |  |
| 12 | Penyediaan Logistik Bagi Anak di UPT Tat Twam Asi | Penyediaan Logistik Bagi Anak di UPT Tat Twam Asi | Penyediaan Logistik Bagi Anak di UPT Tat Twam Asi | 12 bulan, 45 orang | 12 bulan, 45 orang | APBD KAB | DAU |  360.960.800  |  360.960.800  |  -  | 360.960.800 | 360.960.800 | 360.960.800 |  -  |  -  |  |  |  |
| 13 | Fasilitasi penanganan bantuan KUBE Fakir Miskin | Terbinanya Kube (Kelompok Usaha Bersama) fakir Miskin | Terbinanya Kube (Kelompok Usaha Bersama) fakir Miskin | 200 kube | 200 kube | APBD KAB | DAU |  112.000.000  |  112.000.000  |  -  | 112.000.000 | 112.000.000 | 112.000.000 |  -  |  -  |  |  |  |
| 14 | Fasilitasi dan Pembinaan Panti-Panti | Pembinaan kepada Panti-panti Sosial | Pembinaan kepada Panti-panti Sosial | 8 Panti (5 asuhan, 3 psikotik) | 8 Panti (5 asuhan, 3 psikotik) | APBD KAB | DAU |  25.000.000  |  25.000.000  |  -  | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 |  -  |  -  |  |  |  |
| 15 | Fasilitasi dan Pembinaan Organisasi Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan Karang Taruna | Pengiriman peserta dan pembinaan Orsos, PSM dan karang taruna.  | Pengiriman peserta dan pembinaan Orsos, PSM dan karang taruna.  | 200 org (pengiriman bimbingan/pembinaan orsos, psm, karang teruna), | 200 org (pengiriman bimbingan/pembinaan orsos, psm, karang teruna), | APBD KAB | DAU |  37.246.500  |  37.246.500  |  -  | 37.246.500 | 37.246.500 | 37.246.500 |  -  |  -  |  |  |  |
| 16 | Pelayanan penanganan masalah sosial | Cakupan layanan penanganan masalah sosial di kecamatan dan fasilitasi layanan (LK3) Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga | Cakupan layanan penanganan masalah sosial di kecamatan dan fasilitasi layanan (LK3) Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga | 16 kec, 1 LK3 | 16 kec, 1 LK3 | APBD KAB | DAU |  300.000.000  |  300.000.000  |  -  | 300.000.000 | 300.000.000 | 300.000.000 |  -  |  -  |  |  |  |
| 17 | Validasi Sasaran Program Penanganan Fakir Miskin | Verifikasi dan Validasi data Penerima program Penangan Fakir Miskin, PMKS dan PSKS | Verifikasi dan Validasi data Penerima program Penangan Fakir Miskin, PMKS dan PSKS, BPJS | 16 Kecamatan | 16 Kecamatan, 1 org | APBD KAB | DAU |  290.000.000  |  290.000.000  |  -  | 290.000.000 | 290.000.000 | 290.000.000 |  -  |  -  |  |  |  |
| 18 | Penyelenggaraan Rehabilitasi Anak Bermasalah | Bansos alat, Pengiriman anak ke Balai | Bansos alat, Pengiriman anak ke Balai | 10 paket bansos; 20 anak kirim balai | 8 paket bansos; 20 anak kirim balai | APBD KAB | DAU |  74.000.000  |  67.701.000  |  (6.299.000) | 74.000.000 | 74.000.000 | 74.000.000 |  -  |  (6.299.000) |  |  |  |
| 19 | Fasilitasi Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (RASTRA) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) | Terlaksana bantuan pangan non tunai  | Terlaksana bantuan pangan non tunai  | 16 Kecamatan | 16 Kecamatan | APBD KAB | DAU |  153.000.000  |  153.000.000  |  -  | 153.000.000 | 153.000.000 | 153.000.000 |  -  |  -  |  |  |  |
| 20 | Pemberian Pemenuhan Kebutuhan Dasar di lembaga kesejahteraan Sosial (LKS) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak | Terpenuhinya Kebutuhan Dasar di lembaga kesejahteraan Sosial (LKS) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak | Terpenuhinya Kebutuhan Dasar di lembaga kesejahteraan Sosial (LKS) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak | 12 bulan | 12 bulan | APBD KAB | DAU |   |   |   |   |   |   |  -  |  -  |  |  |  |
| **II** | **Program Penghargaan Kepahlawanan** | **Cakupan penghargaan kepahlawan**  | **Cakupan penghargaan kepahlawan**  | **100%** | **100%** |   |   |  **77.288.400**  |  **77.288.800**  |  **400**  | **77.288.400** | **77.288.400** | **77.288.400** |  400  |  -  |  |  |  |
| 1 | Pemberian Tali Asih Keluarga Perintis dan Veteran | Tali Asih kepada Keluarga Perintis Kemerdekaan dan Veteran Miskin | Tali Asih kepada Keluarga Perintis Kemerdekaan dan Veteran Miskin | 21 org | 21 org | APBD KAB | DAU |  19.079.700  |  19.080.000  |  300  | 19.079.700 | 19.079.700 | 19.079.700 |  300  |  -  |  |  |  |
| 2 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) | Pemeliharaan TMP, Pembuatan tembok abadi | Pemeliharaan TMP, Pembuatan tembok abadi | 12 bulan, 12 M2 | 12 bulan, 12 M2 | APBD KAB | DAU |  58.208.700  |  58.208.800  |  100  | 58.208.700 | 58.208.700 | 58.208.700 |  100  |  -  |  |  |  |
| **III** | **Program Pemberdayaan Perempuan dan Anak** | **Persentase SKPDKabupaten yangmelaksanakan Programdan Kegiatan ResponsifGender** | **Persentase SKPDKabupaten yangmelaksanakan Programdan Kegiatan ResponsifGender** | **87%** | **87%** |   |   |  **869.500.000**  |  **869.500.000**  |  **-**  | **869.500.000** | **869.500.000** | **869.500.000** |  -  |  -  |  |  |  |
|  |  |  | **Persentase Anggaran Responsif Gender di PD Kabupaten** |  | **38%** |   |   |  |  |  |  |  |  |  -  |  -  |  |  |  |
|  |  |  | **Persentase Desa yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam perencanaan anggaran desa** |  | **60%** |   |   |  |  |  |  |  |  |  -  |  -  |  |  |  |
|  |  |  | **Cakupan ketersediaan tenaga pelayanan pengaduan terlatih,bantuan hukum untuk mendampingi korban dan saksi dan layanan pemulangan korban perempuan dan anak** |  | **100%** |   |   |  |  |  |  |  |  |  -  |  -  |  |  |  |
|  |  |  | **Persentase penanganan tindak kekerasan berbasis gender dan anak** |  | **100%** |   |   |  |  |  |  |  |  |  -  |  -  |  |  |  |
|  |  |  | **Persentase Capaian indikator Kabupaten Purworejo Layak Anak** |  | **78.00%** |   |   |  |  |  |  |  |  |  -  |  -  |  |  |  |
|  |  |  | **Persentase pemenuhan perlindungan dan kesejahteraan anak.** |  | **83.00%** |   |   |  |  |  |  |  |  |  -  |  -  |  |  |  |
|  |  |  | **Jumlah kelompok perempuan yang dilatih** |  | **30** |   |   |  |  |  |  |  |  |  -  |  -  |  |  |  |
| 1 | Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) | Rakor, Pelatihan, Sosialisasi PPRG desa dan penyusunan data pilah gender | Rakor, Pelatihan, Sosialisasi PPRG desa dan penyusunan data pilah gender | 12 kali, 720 orang, 1 dokumen | 12 kali, 720 orang, 1 dokumen | APBD KAB | DAU |  115.000.000  |  115.000.000  |  -  | 115.000.000 | 115.000.000 | 115.000.000 |  -  |  -  |  |  |  |
| 2 | Penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak | Rakor; Pelatihan; Fasilitasi Lembaga | Rakor; Pelatihan; Fasilitasi Lembaga, BPJS | 17 keg. (1 kab, 16 kecamatan); 150 orang (pelatihan) (daerah rentan kasus gender); 3 orang (Psikolog) | 17 keg. (1 kab, 16 kecamatan); 150 orang (pelatihan) (daerah rentan kasus gender); 3 orang (Psikolog), 2 org | APBD KAB | DAU |  170.000.000  |  170.000.000  |  -  | 170.000.000 | 170.000.000 | 170.000.000 |  -  |  -  |  |  |  |
| 3 | Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) | Penanganan kasus kekerasan berbasis gender dan anak; Pemberdayaan korban perrempuan, Penyuluhan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di sekolah | Penanganan kasus kekerasan berbasis gender dan anak; Pemberdayaan korban perrempuan, Penyuluhan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di sekolah, BPJS | 65 kasus kekerasan; 15 orang (pemberdayaan korban perempuan); 40 orang siswa | 65 kasus kekerasan; 15 orang (pemberdayaan korban perempuan); 40 orang siswa, 1 org | APBD KAB | DAU |  80.000.000  |  80.000.000  |  -  | 80.000.000 | 80.000.000 | 80.000.000 |  -  |  -  |  |  |  |
| 4 | Penyelenggaraan pemenuhan hak anak | Rakor Gugus tugas KPLA (Kabupaten Purwoejo Layak Anak), Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan/Desa Layak Anak; Pelatihan advokasi, Fasilitasi Forum Komunikasi Anak Purworejo (Forkare) | Rakor Gugus tugas KPLA (Kabupaten Purwoejo Layak Anak), Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan/Desa Layak Anak; Pelatihan advokasi, Fasilitasi Forum Komunikasi Anak Purworejo (Forkare) | 1 dokumen KPLA; 16 kecamatan; 1 lembaga forkare | 1 dokumen KPLA; 16 kecamatan; 1 lembaga forkare | APBD KAB | DAU |  150.000.000  |  150.000.000  |  -  | 150.000.000 | 150.000.000 | 150.000.000 |  -  |  -  |  |  |  |
| 5 | Operasional Taman Cerdas | Operasional, Pemeliharaan dan Even anak | Operasional, Pemeliharaan dan Even anak, BPJS | 12 bulan/2 kali kegiatan anak | 12 bulan/2 kali kegiatan anak | APBD KAB | DAU |  75.000.000  |  75.000.000  |  -  | 75.000.000 | 75.000.000 | 75.000.000 |  -  |  -  |  |  |  |
| 6 | Fasilitasi Pembinaan DWP | Pertemuan, rakor, pembinaan, dan Pelatihan | Pertemuan, rakor, pembinaan, dan Pelatihan | 12 bln dwp; 240 orang perempuan (pelatihan di desa merah) | 12 bln dwp; 240 orang perempuan (pelatihan di desa merah) | APBD KAB | DAU |  70.000.000  |  70.000.000  |  -  | 70.000.000 | 70.000.000 | 70.000.000 |  -  |  -  |  |  |  |
| 7 | Fasilitasi Pembinaan GOW | Pertemuan, rakor, pembinaan, dan Pelatihan | Pertemuan, rakor, pembinaan, dan Pelatihan | 12 bln/180 org perempuan | 12 bln/180 org perempuan | APBD KAB | DAU |  62.500.000  |  62.500.000  |  -  | 62.500.000 | 62.500.000 | 62.500.000 |  -  |  -  |  |  |  |
| 8 | Dukungan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak | Rakor; Seminar dan pameran produk kelompok perempuan; Lomba dan bakti sosial; Bina Keluarga TKI; Pembinaan KSIB (Kecamatan Sayang Ibu dan Bayi); Pembinaan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan; Pembekalan Peningkatan kualitas keluarga bagi kader PPPA. | Rakor; Seminar dan pameran produk kelompok perempuan; Lomba dan bakti sosial; Bina Keluarga TKI; Pembinaan KSIB (Kecamatan Sayang Ibu dan Bayi); Pembinaan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan; Pembekalan Peningkatan kualitas keluarga bagi kader PPPA. | 2 kali rakor pokja; 2 kali seminar; 3 kelompok pembinaan | 2 kali rakor pokja; 2 kali seminar; 3 kelompok pembinaan | APBD KAB | DAU |  147.000.000  |  147.000.000  |  -  | 147.000.000 | 147.000.000 | 147.000.000 |  -  |  -  |  |  |  |
| **IV** | **Program Keluarga Berencana** | **Rata-rata jumlah anak per keluarga**  | **Rata-rata jumlah anak per keluarga**  | **1.3** | **1.3** |  |  |  **8.462.285.000**  |  **8.672.285.000**  |  **210.000.000**  | **8.462.285.000** | **8.462.285.000** | **8.462.285.000** |   |  -  |  |  |  |
|  |  | **Jumlah kelompok KB pria**  | **Jumlah kelompok KB pria**  | **51** | **51** |  |  |  |  |  |  |  |  |  -  |  -  |  |  |  |
|  |  | **Rasio akseptor KB**  | **Rasio akseptor KB**  | **10,4** | **10,4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  -  |  -  |  |  |  |
|  |  | **Cakupan peserta KB aktif** | **Cakupan peserta KB aktif** | **82,95%** | **82,95%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  -  |  -  |  |  |  |
|  |  | **Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmetneed)** | **Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmetneed)** | **7,25%** | **7,25%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  -  |  -  |  |  |  |
|  |  | **Persentase remaja yang diberikan penyuluhan KRR**  | **Persentase remaja yang diberikan penyuluhan KRR**  | **8,61%** | **8,61%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  -  |  -  |  |  |  |
|  |  | **Persentase Jumlah peserta KB Mandiri**  | **Persentase Jumlah peserta KB Mandiri**  | **42,97%** | **42,97%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  -  |  -  |  |  |  |
| 1 | Pelayanan Kontrasepsi KB | Pelayanan kontrasepsi KB | Pelayanan kontrasepsi KB, BPJS | 1000 org | , 1 org | APBD KAB | DAU |  242.000.000  |  242.000.000  |  -  | 242.000.000 | 242.000.000 | 242.000.000 |  -  |  -  |  |  |  |
| 2 | Pelayanan KB Medis Operasi | Pelayanan KB MOP dan MOW | Pelayanan KB MOP dan MOW, BPJS Kesehatan | 40 akseptor | 40 akseptor | APBD KAB | DAU |  40.000.000  |  40.000.000  |  -  | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 |  -  |  -  |  |  |  |
| 3 | Fasilitasi Penggerakan KB melalui Organisasi Masyarakat | Rakor penggerakan KB bagi organisasi masyarakat | Rakor penggerakan KB bagi organisasi masyarakat | 1 kali / 50 org | 1 kali / 50 org | APBD KAB | DAU |  15.000.000  |  225.000.000  |  210.000.000  | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |  210.000.000  |  -  |  |  |  |
|   |   |   | Publikasi pembangunan bidang sosial, KB, dan pengendalian penduduk |   | 20.000 eksemplar |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| 4 | Penilaian DUPAK bagi jabatan fungsional khusus PKB | Penilaian angka kredit bagi PKB/PLKB | Penilaian angka kredit bagi PKB/PLKB | 2 keg / 94 pkb | 2 keg / 94 pkb | APBD KAB | DAU |  50.000.000  |  50.000.000  |  -  | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 |  -  |  -  |  |  |  |
| 5 | Pelayanan Komunikasi Informasi Edukasi KKB (KIE KKB) | Rakor PPKBD, Harganas, dan Lomba. | Rakor PPKBD, Harganas, dan Lomba., BPJS | 12 kali (494 org tiap pertemuan), 1 kali, 6 jenis. | 12 kali (494 org tiap pertemuan), 1 kali, 6 jenis, 1 org | APBD KAB | DAU |  635.800.000  |  635.800.000  |  -  | 635.800.000 | 635.800.000 | 635.800.000 |  -  |  -  |  |  |  |
| 6 | Fasilitasi Kampung Keluarga Berencana | Seminar dan Studi Banding | Seminar dan Studi Banding | 2 kali seminar, 1 kali studi banding (40 desa) | 2 kali seminar, 1 kali studi banding (40 desa) | APBD KAB | DAU |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  |  |  |
| 7 | Pengadaan Sarana Kerja PPKDB dan Sub PPKDB (DAK) | Sarana dan prasarana petugas Lapangan KB | Sarana dan prasarana petugas Lapangan KB | 1 paket | 1 paket | DAK | DAK |  741.000.000  |  741.000.000  |  -  | 741.000.000 | 741.000.000 | 741.000.000 |  -  |  -  |  |  |  |
| 8 | Pengadaan Genre KIT (DAK) | Sarana Genre KIT | Sarana Genre KIT | 1 paket | 1 paket | DAK | DAK |  391.635.000  |  391.635.000  |  -  | 391.635.000 | 391.635.000 | 391.635.000 |  -  |  -  |  |  |  |
| 9 | Operasional KB (DAK) | Operasional Balai Penyuluhan KB dan pendistribusian Alkon KB | Operasional Balai Penyuluhan KB dan pendistribusian Alkon KB | 16 kec | 16 kec | DAK | DAK |  6.346.850.000  |  6.346.850.000  |  -  | 6.346.850.000 | 6.346.850.000 | 6.346.850.000 |  -  |  -  |  |  |  |
| **V** | **Program Peningkatan Kepesertaan Keluarga Berencana bagi Pasangan Usia Subur Miskin** | **Jumlah Pasangan Usia Subur miskin yang terlayani KB** | **Jumlah Pasangan Usia Subur miskin yang terlayani KB** | **1.671 akseptor** | **1.671 akseptor** |   |   |  **114.000.000**  |  **114.000.000**  |  **-**  | **114.000.000** | **114.000.000** | **114.000.000** |  -  |  -  |  |  |  |
| 1 | Pelayanan Kontrasepsi Keluarga Berencana Bagi Keluarga Miskin | Pelayanan KB bagi PUS miskin | Pelayanan KB bagi PUS miskin | 557 akseptor | 557 akseptor | APBD KAB | DAU |  114.000.000  |  114.000.000  |  -  | 114.000.000 | 114.000.000 | 114.000.000 |  -  |  -  |  |  |  |
| **VI** | **Program Keluarga Sejahtera** | **Persentase anggota UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) yang ber KB** | **Persentase anggota UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) yang ber KB** | **83,00%** | **83,00%** |   |   |  **292.000.000**  |  **292.000.000**  |  **-**  | **292.000.000** | **292.000.000** | **292.000.000** |  -  |  -  |  |  |  |
|   |  | **Cakupan Kelompok Bina Keluraga Balita (BKB) Paripurna** | **Cakupan Kelompok Bina Keluraga Balita (BKB) Paripurna** | **16,23%** | **16,23%** |   |   |  |  |  |  |  |  |  -  |  -  |  |  |  |
|   |  | **Cakupan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) Paripurna** | **Cakupan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) Paripurna** | **31,62%** | **31,62%** |   |   |  |  |  |  |  |  |  -  |  -  |  |  |  |
|   |  | **Cakupan Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) Paripurna** | **Cakupan Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) Paripurna** | **17,28%** | **17,28%** |   |   |  |  |  |  |  |  |  -  |  -  |  |  |  |
| 1 | Pelatihan Kader Kelompok Tri Bina Keluarga dan anggota POSDAYA | Pelatihan Kelompok Tri Bina Keluarga | Pelatihan Kelompok Tri Bina Keluarga, BPJS | 48 kelompok 192 orang | 48 kelompok 192 orang, 1 org | APBD KAB | DAU |  100.000.000  |  100.000.000  |  -  | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 |  -  |  -  |  |  |  |
| 2 | Dukungan Updating Data Keluarga | Data Kependudukan dan Keluarga Berencana | Data Kependudukan dan Keluarga Berencana | 1 dokumen | 1 dokumen | APBD KAB | DAU |  40.000.000  |  40.000.000  |  -  | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 |  -  |  -  |  |  |  |
| 3 | Pelatihan Keterampilan untuk Kader dan Anggota Kelompok Kegiatan BKB | Pelatihan kader dan anggota kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL) | Pelatihan kader dan anggota kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL) | 16 kelompok/48 org | 16 kelompok/48 org | APBD KAB | DAU |  22.000.000  |  22.000.000  |  -  | 22.000.000 | 22.000.000 | 22.000.000 |  -  |  -  |  |  |  |
| 4 | Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) | Penyuluhan KRR | Penyuluhan KRR | 300 orang/10 Sekolah | 300 orang/10 Sekolah | APBD KAB | DAU |  100.000.000  |  100.000.000  |  -  | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 |  -  |  -  |  |  |  |
| 5 | Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa | Pengembangan Pusat Informasi dan Konseling Remaja | Pengembangan Pusat Informasi dan Konseling Remaja | 10 klp | 10 klp | APBD KAB | DAU |  30.000.000  |  30.000.000  |  -  | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |  -  |  -  |  |  |  |
|  | **Administrasi Umum** |   |   |   |   |   |   |  **1.116.416.400**  |  **1.438.872.100**  |  **322.455.700**  | **1.116.416.400** | **1.116.416.400** | **1.116.416.400** |   |  -  |  |  |  |
| **VII** | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Cakupan layanan administrasi perkantoran** | **Cakupan layanan administrasi perkantoran** | **100%** | **100%** |   |   |  **681.047.400**  |  **682.438.800**  |  **1.391.400**  | **681.047.400** | **681.047.400** | **681.047.400** |   |  -  |  |  |  |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Pelayanan Jasa Surat Menyurat | Pelayanan Jasa Surat Menyurat | 12 bulan | 12 bulan | APBD KAB | DAU |  3.099.000  |  3.099.000  |  -  | 3.099.000 | 3.099.000 | 3.099.000 |  -  |  -  |  |  |  |
| 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Rekening Telpon; Internet; Listrik dan air; | Rekening Telpon; Internet; Listrik dan air; | 4 jenis rekening, 12 bulan | 4 jenis rekening, 12 bulan | APBD KAB | DAU |  86.400.000  |  86.400.000  |  -  | 86.400.000 | 86.400.000 | 86.400.000 |  -  |  -  |  |  |  |
| 3 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jasa Kebersihan Kantor | Jasa Kebersihan Kantor, BPJS | 2 orang, 12 bulan | 2 orang, 12 bulan | APBD KAB | DAU |  19.200.000  |  19.710.000  |  510.000  |  19.200.000  |  19.200.000  |  19.200.000  |  510.000  |  -  |  |  |  |
| 4 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | ATK | ATK |  44 jenis  |  44 jenis  | APBD KAB | DAU |  40.160.700  |  40.160.700  |  -  | 40.160.700 | 40.160.700 | 40.160.700 |  -  |  -  |  |  |  |
| 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Barang Cetakan;Penggandaan Dokumen | Barang Cetakan;Penggandaan Dokumen | 5 Barang Cetakan dan Penggandaan Dokumen | 5 Barang Cetakan dan Penggandaan Dokumen | APBD KAB | DAU |  20.000.000  |  20.000.000  |  -  | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |  -  |  -  |  |  |  |
| 6 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor |  Alat Instalasi Listrik dan Penerangan |  Alat Instalasi Listrik dan Penerangan | Alat Listrik dan Lampu Penerangan | Alat Listrik dan Lampu Penerangan | APBD KAB | DAU |  8.352.300  |  8.352.300  |  -  | 8.352.300 | 8.352.300 | 8.352.300 |  -  |  -  |  |  |  |
| 7 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Surat Kabar dan Buku Perundang-undangan | Surat Kabar dan Buku Perundang-undangan | Surat Kabar dan Buku Perundang-undangan | Surat Kabar dan Buku Perundang-undangan | APBD KAB | DAU |  2.883.600  |  3.000.000  |  116.400  | 2.883.600 | 2.883.600 | 2.883.600 |  116.400  |  -  |  |  |  |
| 8 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Minum Harian Pegawai, Rapat rapat dan Tamu | Minum Harian Pegawai, Rapat rapat dan Tamu | 187 orang, 253 hr, 435 org, 510 org | 187 orang, 253 hr, 435 org, 510 org | APBD KAB | DAU |  169.498.800  |  169.498.800  |  -  | 169.498.800 | 169.498.800 | 169.498.800 |  -  |  -  |  |  |  |
| 9 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah | Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah | 61 kali | 61 kali | APBD KAB | DAU |  120.628.000  |  120.628.000  |  -  | 120.628.000 | 120.628.000 | 120.628.000 |  -  |  -  |  |  |  |
| 10 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah | Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | 212 kali | 212 kali | APBD KAB | DAU |  25.000.000  |  25.000.000  |  -  | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 |  -  |  -  |  |  |  |
| 11 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor | Jasa Keamanan Kantor | Jasa Keamanan Kantor, BPJS | 3 orang / 12 bulan | 3 orang / 12 bulan | APBD KAB | DAU |  30.600.000  |  31.365.000  |  765.000  |  30.600.000  |  30.600.000  |  30.600.000  |  765.000  |  -  |  |  |  |
| 12 | Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih | Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih | Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih | 26 macam Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih | 26 macam Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih | APBD KAB | DAU |  13.196.000  |  13.196.000  |  -  | 13.196.000 | 13.196.000 | 13.196.000 |  -  |  -  |  |  |  |
| 13 | Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Tat Twam Asi | Operasional UPT, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, atk, peralatan kebersihan dan bahan pembersih, jasa pengasuh | Operasional UPT, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, atk, peralatan kebersihan dan bahan pembersih, jasa pengasuh, BPJS Kesehatan | 3 rek; 10 jenis; 12 jenis; 8 org | 3 rek; 10 jenis; 12 jenis; 8 org | APBD KAB | DAU |  142.029.000  |  142.029.000  |  -  | 142.029.000 | 142.029.000 | 142.029.000 |  -  |  -  |  |  |  |
| **VIII** | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana** | **Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan Baik** | **Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan Baik** | **100%** | **100%** |   |   |  **321.415.600**  |  **642.479.900**  |  **321.064.300**  | **321.415.600** | **321.415.600** | **321.415.600** |   |  -  |  |  |  |
| 1 | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor | Pemeliharaan Gedung | Pemeliharaan Gedung | 1200 m2 | 1200 m2 | APBD KAB | DAU |  44.080.000  |  44.080.000  |  -  | 44.080.000 | 44.080.000 | 44.080.000 |  -  |   |  |  |  |
| 2 | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional | Peeliharaan Kendaraan | Peeliharaan Kendaraan, BPJS | 10 Unit roda empat; dan 152 unit roda dua, Minyak Pelumas, BBM, STNK | 10 Unit roda empat; dan 152 unit roda dua, Minyak Pelumas, BBM, STNK, Tenaga Perseorangan | APBD KAB | DAU |  185.660.000  |  185.660.000  |  -  | 185.660.000 | 185.660.000 | 185.660.000 |  -  |  -  |  |  |  |
| 3 | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Pemeliharaan komputer, laptop, pinter, UPS, AC, Mesin Pemotong Rumput | Pemeliharaan komputer, laptop, pinter, UPS, AC, BPJS Kesehatan | 27 kali, 45 kali, 55 kali 5 kali, 14 kali, 1 kali | 27 kali, 45 kali, 55 kali 5 kali, 14 kali, 1 kali | APBD KAB | DAU |  85.949.000  |  51.425.000  |  (34.524.000) | 85.949.000 | 85.949.000 | 85.949.000 |  -  |  (34.524.000) |  |  |  |
| 4 | Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor | Rehabilitasi Gedung | Rehabilitasi Gedung | 1 Gedung | - | APBD KAB | DAU |  -  |  99.736.500  |  99.736.500  | 0 | 0 | 0 |  99.736.500  |  -  |  |  |  |
|   |   |   | Tempat parkir yang direhabilitasi |   | 1 Paket |   |   |   |   |   |   |   |   |  -  |  -  |  |  |  |
| 5 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur UPT Tat Twam Asi | Komputer, dan gedung | Komputer, dan gedung, BPJS | 2 unit, 410 m2 | 2 unit, 410 m2 | APBD KAB | DAU |  5.726.600  |  5.726.600  |  -  | 5.726.600 | 5.726.600 | 5.726.600 |  -  |  -  |  |  |  |
| 6 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor |   | Laptop dan Komputer PC |   | 2 unit |   | DAU |  -  |  39.262.300  |  39.262.300  | 0 | 0 | 0 |  39.262.300  |  -  |  |  |  |
| 7 | Pengadaan Sarana Prasarana UPT Rumah Pelayanan Sosial Tat Twam Asi |   | Sarana prasarana UPT Rumah Pelayanan Sosial Tat Twam Asi |   | 25 Jenis |   | DAU |  -  |  199.589.500  |  199.589.500  | 0 | 0 | 0 |  199.589.500  |  -  |  |  |  |
| 8 | Penyediaan Pakaian Dinas Pegawai dan Perlengkapannya |   | Kain Batik Lokal Purworejo |   | 52 Potong |   | DAU |  -  |  17.000.000  |  17.000.000  |  -  |  -  |  -  |  17.000.000  |  -  |  |  |  |
| **IX** | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **Persentase capaian kinerja dan keuangan** | **Persentase capaian kinerja dan keuangan** | **100%** | **100%** |   |   |  **95.105.400**  |  **95.105.400**  |  **-**  | **95.105.400** | **95.105.400** | **95.105.400** |  -  |  -  |  |  |  |
| 1 | Penyusunan Pelaporan Keuangan | Dokumen Pelaporan | Dokumen Pelaporan | 19 Dokumen | 19 Dokumen | APBD KAB | DAU |  42.705.500  |  42.705.500  |  -  | 42.705.500 | 42.705.500 | 42.705.500 |  -  |  -  |  |  |  |
| 2 | Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan | Renstra, RKA, DPA, RKA Perubahan, DPpA, RKT, Renja, LKPJ, LPPD, Tapkin, LKJiP, Forum OPD, SPIP | Renstra, RKA, DPA, RKA Perubahan, DPpA, RKT, Renja, LKPJ, LPPD, Tapkin, LKJiP, Forum OPD, SPIP, BPJS Kesehatan | 14 Dokumen | 14 Dokumen | APBD KAB | DAU |  52.399.900  |  52.399.900  |  -  | 52.399.900 | 52.399.900 | 52.399.900 |  -  |  -  |  |  |  |
| **X** | **Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan** | **Persentase tersedianya data dasar pembangunan** | **Persentase tersedianya data dasar pembangunan** | **100%** | **100%** |   |   |  **18.848.000**  |  **18.848.000**  |  **-**  | **18.848.000** | **18.848.000** | **18.848.000** |  -  |  -  |  |  |  |
| 1 | Penyusunan Data Dasar Pembangunan | data dasar pembangunan | data dasar pembangunan | 1 dokumen | 1 dokumen | APBD KAB | DAU |  18.848.000  |  18.848.000  |  -  | 18.848.000 | 18.848.000 | 18.848.000 |  -  |  -  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **JUMLAH** |  **13.910.598.300**  |  **14.436.755.400**  |  **526.157.100**  | **13.910.598.300** | **13.910.598.300** | **13.910.598.300** |  |  |  |  |  |

**BABV**

# PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah merupakan gambaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 setelah ada pengesahan sesuai dengan kebutuhan dan tugas fungsi dinas. Renja Perubahan ini masih melalui beberapa tahap pembahasan sebelum menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Kami mengharap program dan kegiatan serta anggaran mendapat dukungan dari para pemangku kepentingan (*stakeholder*) agar permasalahan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana dapat diselesaikan. Semoga Rencana Kerja Perubahan ini menjadi pedoman bagi para pelaksana program/kegiatan di tahun 2019. Kritik dan saran kami harapkan agar penyusunan Renja Perubahan berikutnya lebih baik dan sempurna.

|  |
| --- |
| Purworejo, 25 Juli 2019 |
| Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, PemberdayaanPerempuan dan Perlindungan AnakKabupaten Purworejo**dr.Kuswantoro, M.Kes**Pembina Utama MudaNIP. 19621204 198803 1 011 |